

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT  
HAK MILIK ATAS TANAH OLEH PENGGARAP TANAH ILEGAL  
DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA I BERDASARKAN  
PUTUSAN NOMOR : 17/G/2015/PTUN-BNA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

**ANDITTO YUMAZIDHAN  
NPM : 71180111048**

**HUKUM/HUKUM TATA NEGARA/HAN**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2022**

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketekunan pada penulis sehingga mampu dan berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari terdapatnya kekurangan, namun demikian dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Demi terwujudnya penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda yang dengan susah payah telah membesar dan mendidik penulis hingga saat ini, kepada Bapak Dr. Marzuki, SH.M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan yang telah memberikan pengarahan selama saya menempuh jenjang Pendidikan di UISU, kepada Bapak Dr. Mustamam, M.Ag, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum UISU Medan, Kepada Ibu

Nurasiah Harahap SH.M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU Medan, kepada Bapak Drs. Sutarni, SH.M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU Medan selanjutnya kepada Bapak Dr.Ibnu Affan, SH.M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Ibu Maria Rosalina, SH.M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU sekaligus selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini, kepada Bapak Jauhari Ginting, SH.MH, sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini, dan Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum UISU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini dan juga tenaga kepegawaian yang telah membantu dalam administrasi perkuliahan.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah SWT yang dapat membalas budi baik semuanya.

Medan, 20 Oktober 2022

Penulis

**Anditto Yumazidhan**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Hak Milik Atas Tanah .....	11
1. Pengertian Hak Milik Atas Tanah .....	11
2. Sertifikat Hak Atas Tanah.....	16
3. Kekuatan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.....	19
4. Pengertian dan Proses Pembatalan Sertifikat .....	21
B. Hak Guna Usaha .....	22
1. Pengertian Hak Guna Usaha.....	22
2. Terjadinya Hak Guna Usaha .....	24
3. Jangka Waktu Hak Guna Usaha .....	26
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Objek Penelitian.....	31

B.	Sifat Penelitian .....	31
C.	Metode Pendekatan.....	31
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	31
1.	Sumber Data .....	31
2.	Alat Pengumpulan Data .....	32
E.	Analisis Data.....	33
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>35</b>
A.	Kedudukan Hak Guna Usaha (HGU) di PT. Perkebunan Nusantara I .....	35
B.	Mekanisme Pengajuan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Terhadap Individu Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/BPN/ Nomor 9 tahun 1999 .....	43
C.	Dampak Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Terhadap Individu dan PT.Perkebunan Nusantara I Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/BPN/Nomor 9 Tahun 1999 .....	62
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>74</b>
A.	Kesimpulan .....	74
B.	Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA.****LAMPIRAN.**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi, **Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- ; **Sertifikat Hak Atas Tanah**, Sinar Gravika, Jakarta, 2012.
- Ali Achmad Chomzah, **Hukum Pertanahan (Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II-Sertifikat dan Permasalahannya)**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2013.
- AP. Parlindungan, **Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria**, Mandar Madju, Bandung, 2003.
- Bachtiar Effendie, **Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya**, Alumni, Bandung, 2013.
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- Boedi Harsono, **Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya**, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Effendi Perangin-angin. **Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Martiman Prodjohamidjojo, **Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara**, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Muhammad Yamin, **Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria**, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003
- M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, **Hukum Administrasi dan Good Governance**, Universitas Trisakti, Jakarta, 2011.
- Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling)**, Djumali, Surabaya, 2015.

Sahnan, **Hukum Agraria Indonesia**. Setara Press, Malang, 2016.  
SF. Marbun, **Peradilan Tata Usaha Negara**, Liberty, Yogyakarta, 2018.

Sudargo Gautama., **Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria**, Alumni, Bandung, 2003.

Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2016

Supriadi. **Hukum Agraria**. Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Tampil Anshari Siregar, **Undang-Undang Pokok agraria Dalam Bagan**, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 2001.

Urip Santoso, **Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

WJS. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

## **C. Putusan**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 17/G/2015/PTUN-Bna.

#### **D. Jurnal**

Dadi Arja Kusuma, **Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat**, Jurnal Ius, Vol. V Nomor 2 Agustus 2017.

Indrayanto, **Perubahan Pokok dalam Peraturan Pendaftaran Tanah Menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 dengan PP Nomor 24 Tahun 1997**, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia, Tahun Ke-36 No.3 Juli-September 2016.

Irene Eka Sihombing, **Lembaga Rechtsverwerking Solusi Mengatasi Sengketa Tanah**, Jurnal Hukum Prioris, Volume 2, Nomor 1, September 2018.

Rugeri Roring, **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997**, Jurnal Lex Crimen Vol. VI No. 5 Jul I 2017.

